

KEPENTINGAN VIETNAM MEMPERBAIKI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN AMERIKA SERIKAT PASCA EMBARGO

Oleh : Ryan Rwanda

rwandaryan@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan S.IP, M.Si

Bibliografi : 15 Jurnal atau Research Paper, 23 Buku, 7 dokumen resmi, 12 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Vietnam and United States of America make a reconciliation in their bilateral relationship. This reconciliation was marked by the embargo's retraction that given by the US to Vietnam in 19 . Historically, the two countries doesn't have a good relationship in a long time. Vietnam is a country that have a communist ideology that contradict the ideology of US, which is liberal.

This research theoretically has built by using Realist theory and realist point of view. Formulation of all arguments, data, facts, and theoretical framework in this research using qualitative explanation methods. This research also using nation-state as the level of analyze, the focus on this research is explain the causes of reconciliation between Vietnam and US according to

This research proves that Vietnam need an ally from superpower country to maintain their sovereignty and the welfare of it's people. US in the other hand, need to keep their influence in that region. Reseacrher has formulated the hypothesis answer which proved that both Vietnam and US have their own interests in this reconciliation of bilateral relationship.

Keywords : Billateral relationship's reconciliation, Communist ideology, Embargo's retraction.

PENDAHULUAN

Clausewitz mengatakan, *War is nothing but a duel on a larger scale* yang berarti "Perang tidak lain dari pertarungan dalam skala yang lebih besar". Hal itu bermakna bahwa perang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berhadapan dimana masing-masing menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan 'Will' atau kehendaknya kepada satu sama lain.

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah penjajahan yang panjang. Kultur politik sosialis-komunis yang mengakar kuat di negara ini merupakan dampak dari penguasaan Tiongkok atas Vietnam selama puluhan abad. Vietnam di era modern menjadi wilayah jajahan Eropa, diantaranya negara Perancis yang berkeinginan untuk menyaingi kebangkitan kebangkitan Britania Raya serta kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri Perancis.

Perang Vietnam merupakan bentuk perang saudara yang kemudian menjadi konflik internasional dan melibatkan Amerika Serikat. Amerika Serikat berupaya untuk menghentikan penyebaran ideologi komunis, karena perang ini terjadi pada masa perang dingin. Perang Vietnam disebut sebagai 'Perang Proxi' karena Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berhadapan secara langsung di medan pertempuran karena dikhawatirkan akan meletusnya perang nuklir.

Upaya Amerika Serikat dalam menghentikan penyebaran ideologi komunis dengan berbagai cara, yaitu dengan menurunkan tentara-tentara dan peralatan perangnya langsung untuk bertempur di medan perang serta memberikan embargo senjata terhadap Vietnam. Embargo senjata bertujuan agar pasokan senjata (peralatan perang) Vietnam habis, sehingga akan lebih memudahkan Amerika Serikat dalam mengalahkan tentara-tentara Vietnam.

Pada 7 Mei 1954, Jendral Vo Nguyen Giap berhasil mengalahkan pasukan Perancis di wilayah Bien Phu dan berhasil mengakhiri pendudukan Perancis atas Vietnam. Karena hal tersebut, akhirnya dilakukan Konvensi Jenewa dilakukan pada 8 Mei 1954 untuk membahas masalah indochina.¹ Konvensi tersebut melibatkan Inggris, Perancis, Uni Soviet, Tiongkok dan Vietnam Utara.

Konvensi Jenewa tersebut berakhir pada 21 Juli 1954 dengan hasil dua kesepakatan yang telah disetujui bersama yaitu perjanjian gencatan senjata dan deklarasi final (*Final Declaration*).² Namun Amerika Serikat dan Vietnam Selatan tidak menyetujui kesepakatan tersebut hingga pada akhirnya Vietnam pun terbagi menjadi dua wilayah yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.

Seiring waktu, Vietnam Utara masih berjuang untuk menyatukan wilayah Vietnam menjadi negara kesatuan yang merdeka dan berazaskan Sosialis-Komunis. Pergerakan yang dilakukan oleh Vietnam Utara untuk menyatukan negara Vietnam telah menyebabkan pergesekan dan berujung menjadi perang antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Dalam kurun waktu perang tersebut, pada tahun 1964, Amerika Serikat memberikan sanksi embargo ekonomi dan kerjasama internasional terhadap Vietnam Utara yang mengakibatkan Vietnam Utara kehilangan banyak investasi dan bantuan dari negara-negara yang bekerjasama dengannya. Hingga pada tanggal 30 April 1975, Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon dan menyatakan kemerdekaan negara Kesatuan Vietnam. Kemudian pada tahun 1976, Vietnam mencoba untuk bergabung menjadi anggota PBB, namun dihalangi oleh Amerika Serikat karena hubungan

¹ Peter A. Poole, "*Dien Bhiem Pu 1954: The Battle That Ended the First Indochina War*". New York: Franklin Watts Inc. 1972. hal 67.

² Allan Watt, "*Vietnam: An Australian Analysis*". Melbourne: F.W Cheshire Publishing. 1968. hal 54.

antara Amerika Serikat pada masa itu masih dalam kondisi buruk.

Sanksi embargo ekonomi diberikan Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara pada saat terjadinya perang Vietnam bertambah pada tahun 1979, yang dimana Vietnam pada masa itu melakukan invasi ke Kamboja dan hal ini membuat Amerika dan Sekutu memberikan sanksi embargo ekonomi dan isolasi. Sanksi tersebut membuat kondisi stabilitas perekonomian Vietnam mengalami gangguan karena hanya bergantung dari bantuan Uni Soviet dan juga Vietnam tidak memiliki hubungan kerjasama dengan negara sekitarnya.

Kegagalan Vietnam dalam meningkatkan stabilitas perekonomiannya yang mengadopsi sistem sosialis, membuat pemerintah Vietnam mengambil langkah lain yang dimana Vietnam meliberalkan sistem pasar ekonominya. Vietnam terus mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1991 ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan dan bubar, maka Vietnam kehilangan bantuan dalam ekonominya. Kemudian pada tahun 1994, Amerika Serikat mencabut sanksi embargo ekonominya dan isolasinya dari Vietnam sehingga Vietnam dapat kembali menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teori berguna untuk menuntun peneliti dalam upayanya meneliti dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan, guna mengembangkan wawasan dan keilmuan. Teori diharapkan akan membantu para peneliti agar tidak mengalami masalah dan hambatan dalam penelitian. Teori menjadi alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Teori sangat penting, untuk menuntun peneliti dan ilmuwan dalam upaya

mengembangkan wawasan keilmuan, agar tak mengalami stagnasi.³

Mohtar Mas'ood menjelaskan dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, bahwa teori merupakan sebuah pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori membantu menjelaskan dan meramalkan fenomena sosial, dengan demikian juga membantu dalam pembuatan keputusan yang praktis. Teori merupakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari fakta-fakta, juga merupakan dugaan yang menerangkan sesuatu.⁴

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Realis. Perspektif Realis memandang negara sebagai aktor yang bersifat rasional sehingga dapat memperhitungkan tindakan demi kepentingan keamanan nasional. Thomas Hobbes, salah satu teoritis realisme, memandang manusia pada dasarnya bersifat egosentrik dan konflikual kecuali terdapat kondisi di mana manusia dapat hidup berdampingan. Dalam hal kepentingan pribadi, manusia cenderung mengandalkan diri sendiri dan termotivasi untuk mencari kekuatan lebih besar. Oleh karena itu, mereka juga diyakini menjadi lebih takut. Perspektif realisme mengalami banyak perkembangan seiring perkembangan studi Hubungan Internasional yang semakin berkembang dewasa ini. Teori realisme merupakan reaksi terhadap pemikiran utopianisme yang banyak didominasi oleh studi politik di Amerika Serikat dalam rentang tahun 1940-an hingga 1960-an. Teori Realisme berkembang pada 4 asumsi dasar, yakni:

1. *States are the principal or most important actors.* Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, yang juga menjadi unit analisis dalam studi hubungan internasional. Studi

³Marzuki. M.M. *Metodologi Riset*. BPFE UII. Yogyakarta 2002. Hlm. 33

⁴Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. 1990. Hlm.184

hubungan internasional merupakan studi terhadap unit-unit (negara-negara) tersebut. Realisme hanya menekankan negara sebagai aktor utama, walaupun dalam perkembangan hubungan internasional aktor non-negara juga memiliki peran penting dalam percaturan politik dunia. Perusahaan multinasional, kelompok teroris, NGO, dan aktor non-negara lainnya terkadang diakui perannya oleh kaum realis, tetapi tidak begitu 'mengambil' peran dalam hubungan internasional, negara-lah yang menjadi aktor utama dan dominan.

2. *The state is viewed as a unitary actor.* Negara dipandang sebagai unitary actor yang setidaknya bisa membuat suatu kebijakan terhadap suatu isu tertentu. Negara terintegrasi dengan dunia luar, yang menjadi ketunggalan dalam kedaulatannya terhadap percaturan politik internasional.
3. *The state is essentially a rational actor.* Negara dianggap sebagai aktor rasional, meskipun kaum realis sebenarnya takut pada kesalahpahaman orang-orang dalam memandang negara sebagai rasional aktor.

National Security usually tops the list. Bidang militer dan isu keamanan lain yang terkait mendominasi politik dunia. Kaum realis menganggap bahwa keamanan menjadi bagian paling penting dalam interaksi antar-negara. Terlebih karena sistem internasional pada dasarnya anarki dan manusia pada dasarnya egois dan haus akan kekuasaan. Kaum realis fokus pada potensi konflik yang terjadi antar-negara, sehingga pentingnya keamanan menjadi daftar paling atas dari setiap kepentingan aktor, yang dalam hal ini negara berdaulat.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan negara sebagai tingkat analisa. Tingkat analisa negara merupakan salah satu yang banyak

digunakan dalam penulisan masalah hubungan internasional. Charles W. Kegley Jr dan Eugene R. Wittkopf menyebutkan tingkat analisis negara itu sebagai tingkat nasional atau *national level*. Pada level ini unsur-unsur seperti besarnya negara, lokasi, kekuatan, bentuk dan hambatan yang dihadapinya merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan⁵.

Kemudian teori yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah teori *Balance of Threat*. Stephen Waltz dalam wawancara di Yale menyatakan bahwa Teori Balance of Threat dari John J. Mearsheimer menyatakan bahwa negara secara umum bertindak berdasarkan keseimbangan ancaman terbesar terhadap keamanan negaranya. Faktor-faktor yang menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan mengancam negara lainnya adalah, besar atau jumlah kekuatan negaranya, kedekatan atau jarak wilayahnya, kapabilitas serang, serta tujuan yang mendasari penyerangannya.

Negara yang wilayahnya dekat lebih berbahaya dibandingkan negara yang wilayahnya jauh satu sama lain. Negara dengan jumlah kekuatan militer yang besar dan kapabilitas serang yang lebih tinggi lebih berbahaya daripada negara yang kemampuan militernya hanya sebatas untuk mempertahankan wilayahnya saja, dan negara yang dengan jelas memiliki tujuan dan kepentingan yang kuat tentu saja akan mendasari negara tersebut untuk menyerang negara lain.⁶

Maksud dari teori Mearsheimer adalah untuk menjelaskan relasi antara kekuatan besar dari sistem negara dipengaruhi oleh konflik. Langkah yang diambil Vietnam untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat didasari karena keadaan negaranya yang dalam situasi yang lemah baik secara

⁵ Kegley, Charles W. Jr., and Eugene R. Wittkopf. 1995. *World Politics: Trend and Transformation*. New York: St. Martin's Press.

⁶ <http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2010/09/105202walt.pdf> (diakses pada Juni 2018 pukul 19.20 WIB).

ekonomi dan pertahanan negara. Uni Soviet yang terpecah mengakibatkan Vietnam kehilangan sekutunya sehingga memaksa Vietnam untuk mencari solusi dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.

Tiongkok menjadi salah satu lawan Vietnam dalam masalah klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Kondisi militer Tiongkok tentu saja lebih besar daripada Vietnam, dan keadaan wilayahnya yang cukup dekat menyebabkan Vietnam berada di posisi yang tidak menguntungkan. Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer yang besar dan kemenangannya atas Uni Soviet di perang dingin antar kedua blok menyebabkan Amerika Serikat memiliki kekuatan yang mampu menyaingi Tiongkok. Pilihlah untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Amerika merupakan langkah strategis yang dapat diambil Vietnam untuk memperbaiki kondisi negaranya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁷ Dalam penelitian ini metode kualitatif tersebut tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.

Data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *Library Research*, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan fasilitas internet untuk memperoleh data tambahan.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T Remaja Rosda Karya, 2004), hlm 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terjadinya Perang Vietnam Dan Keterlibatan Amerika Serikat

2.1. Sejarah Penjajahan dan Kemerdekaan Vietnam

Vietnam dijajah oleh Tiongkok sekitar tahun 111 SM – 939 M, sehingga hal ini menyebabkan sistem perpolitikan, ekonomi dan sosialnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Tiongkok.⁸ Kemudian pada tahun 939 M, Ngo Guyen melakukan pergerakan untuk menggulingkan penguasaan Tiongkok terhadap Vietnam. Keberhasilan pergerakan tersebut membuat Vietnam terlepas dari penjajahan Tiongkok dan Vietnam pada masa itu disebut sebagai *Dai Co Viet (Greater Viet)* dengan status merdeka.⁹

Ketika memasuki sekitar tahun 1920, pergerakan untuk menentang pendudukan Perancis di Vietnam mulai berkembang secara sistematis. Diawali dengan terbentuknya partai-partai politik seperti *Viet Nam Thanh Nien Cach Menh Hoi* pada tahun 1925 atau dikenal dengan Persatuan Revolusi Pemuda Vietnam, kemudian pada tahun 1931 partai Komunis Indochina lahir dan *Viet Minh* pada tahun 1941 dibawah pimpinan Ho Chi Minh.¹⁰

Kemudian pada masa perang dunia kedua, tepatnya pada 9 Maret 1945 Jepang melakukan kudeta di Indochina Perancis yang dikenal dengan sebutan *Meigo Sakusen* (Operasi Bulan Purnama)¹¹ Jepang berhasil mengusir dan membuat perancis kehilangan pertahanan di kawasan tersebut. Jepang kemudian mengambil alih dan membentuk kekaisaran Vietnam,

⁸ Abu Thalib Ahmad, *“Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara”*.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.1991. hal 37-44.

⁹ D.R Sardesai, *“Vietnam:The Struggle for National Identity”*.Edisi Kedua.Boulder:Westview Press Inc.,1992. hal 2.

¹⁰ Hugh Higgins, *“Vietnam”*.London:Heinemann Educational Books Ltd.1975. hal 13.

¹¹ Hock, David Koh Wee, *“Legacies of World War II in South and East Asia”*.Institute of Southeast Asian Studies.2007. hal 23-25.

Kerajaan Kamboja dan Kerajaan Laos yang berada di bawah kepemimpinan mereka melalui kekuatan militer yang telah siap sedia untuk melakukan perlawanan jika pasukan sekutu melakukan invasi.¹²

Kemudian pada 20 November 1946, Perancis kembali menguasai wilayah Indochina. Pertempuran antara Vietnam melawan Perancis tidak dapat dihindari hingga pada akhirnya Perancis mengebom pelabuhan Haiphong dan pasukan Vietnam pun harus mundur dari wilayah tersebut.¹³

Pada bulan Januari 1950 yang dimana pada masa ini Perang Dingin telah berlangsung. Vietnam Utara mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Uni Soviet. Sementara Vietnam Selatan yang dipimpin oleh kerajaan Bao Dai didukung penuh oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat pada tahun 1950-1954.¹⁴

Pada 7 Mei 1954, Jendral Vo Nguyen Giap berhasil mengalahkan pasukan Perancis di wilayah Bien Phu dan berhasil mengakhiri pendudukan Perancis atas Vietnam. Karena hal tersebut, akhirnya dilakukan Konvensi Jenewa dilakukan pada 8 Mei 1954 untuk membahas masalah indochina.¹⁵ Konvensi tersebut melibatkan Inggris, Perancis, Uni Soviet, Tiongkok dan Vietnam Utara.

Konvensi Jenewa tersebut berakhir pada 21 Juli 1954 dengan hasil dua kesepakatan yang telah disetujui bersama

yaitu perjanjian gencatan senjata dan deklarasi final (*Final Declaration*).¹⁶

2.2. Pemisahan Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan

Pemisahan dua wilayah Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan adalah hasil dari ketidak sepakatan hasil Konvensi Jenewa yang diadakan setelah Vietnam yang dipimpin oleh Vo Nguyen Giap berhasil mengalahkan Perancis. Dalam Konvensi Jenewa 1954 keputusan akhir adalah meminta agar Vietnam melakukan Pemilihan Umum untuk melakukan penyatuan negaranya menjadi satu kesatuan.

Namun Amerika Serikat dan Vietnam Selatan tidak menyetujui kesepakatan tersebut yang dimana telah direncanakan akan dilakukan Pemilihan Umum di Vietnam pada tahun 1956. Amerika Serikat tidak ingin berkompromi dan bernegosiasi dengan Komunis, sedangkan dari pihak Vietnam Selatan tidak ingin wilayahnya bersatu dengan Viet Minh yang beraliran Komunis. Karena bagi Vietnam Selatan bahwa pihak Komunis adalah penghianat.¹⁷

Setelah Perjanjian Jenewa tersebut, kondisi Vietnam terbagi menjadi dua wilayah yaitu Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Kemudian wilayah Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem yang didukung oleh Perancis dan Amerika Serikat.

2.3. Perang Vietnam dan Campur Tangan Amerika Serikat

Keputusan Akhir (*Final Declaration*) dari Konvensi Jenewa pada tahun 1954 memutuskan agar Vietnam menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk penyatuan negara Vietnam menjadi satu kesatuan. Namun hasil konvensi ini,

¹² Kiyoko Kusuru Nitz, "Japanese Military Policy Towards French Indochina during the Second World: The Road to the Meigo Sakusen". *Journal of Southeast Asian Studies*. 1983. hal 328.

¹³ Kevin Ruane, "War and Revolution in Vietnam 1930-1975". London: UCL Press. 1998. hal 17.

¹⁴ Victor A. De Fiori. "Is United States Participation in South Vietnam and Cambodia". 7 Desember 1970. National Security Council. United States of America. hal 4.

¹⁵ Peter A. Poole, "Dien Bhiem Pu 1945: The Battle That Ended the First Indochina War". New York: Franklin Watts Inc. 1972. hal 67.

¹⁶ Allan Watt, "Vietnam: An Australian Analysis". Melbourne: F.W Cheshire Publishing. 1968. hal 54.

¹⁷ Devillers, *Op. Cit* hal 352-353

ditentang oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan yang pada masa itu dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Karena penentangan ini, akhirnya Vietnam harus dibagi menjadi dua wilayah yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pihak Komunis mendukung Vietnam Utara dan Pihak Liberal memihak Vietnam Selatan.

Kegagalan Pemilihan Umum pada tahun 1956 yang bertujuan untuk menyatukan Vietnam telah membuat Vietnam Utara memilih jalur lain untuk mencapai pemersatuan Vietnam, yaitu dengan cara melancarkan perang revolusi.¹⁸ Pada masa itu, pemerintahan Hanoi membuat kantor pusat di Vietnam Selatan (*Center Office in South Vietnam/COSVN*) yang terletak di sekitar daerah Long Khanh wilayah Binh Duong yang berjarak sekitar 40 Km dari utara Saigon.¹⁹ Fungsi dari COSVN ini adalah sebagai organisasi perpanjangan tangan Vietnam Utara untuk menjalankan operasi penggulingan pemerintahan Vietnam Selatan.

Pada bulan Mei 1959, dibentuk tim mobilisasi 599 (*599th transportaion Group*) yang bertugas untuk mengatur jalur perpindahan pasukan militer Vietnam Utara memasuki wilayah Vietnam Selatan untuk membantu Pasukan Pembebasan Vietnam Selatan melalui jalur darat. Pembentukan Pasukan Pembebasan Vietnam Selatan memiliki dua tujuan utama yaitu menggulingkan pemerintahan Ngo Dinh Diem dan menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menjadi sebuah negara Komunis.²⁰

Kepentingan Strategis Ekonomi Dan Proyeksi Kekuatan Vietnam Di Kawasan Asia Tenggara

3.1. Kegagalan Vietnam Menerapkan Ekonomi Sosialis

Perang saudara yang terjadi antara Vietnam Selatan dan Vietnam utara pada tahun 1955-1975 merupakan sebuah peristiwa besar dan bersejarah yang dikenal dengan istilah Perang Vietnam. Perang tersebut merupakan salah satu dampak dari perang dingin yang terjadi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Bagi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, perang tersebut merupakan momentum untuk menyatukan kembali kedua wilayah tersebut. Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, Australia dan Thailand. Sedangkan Vietnam Utara dibantu oleh Tiongkok, Korea Utara dan Tiongkok.

Akan tetapi, upaya penggabungan kedua wilayah tersebut dengan sistem Sosialis-Komunis ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya penyebaran paham sosialis-komunis terhadap wilayah bekas Vietnam Selatan yang dulunya menganut paham Demokrasi. Kebijakan yang ditempuh Vietnam dalam bidang ekonomi dengan mengubah produksi skala kecil menjadi skala besar dengan menghapus sistem kapitalis yang akhirnya pembangunan ekonomi berfokus kepada industri berat, agrikultur dan industri modern.²¹

Kebijakan ekonomi tersebut mengalami kegagalan yang membuat perekonomian Vietnam mengalami keterpurukan. Pemerintah Vietnam yang beraliran Sosialis mengalami kendala dalam mengatur kebijakan pemerintahan menggunakan sistem sosialis karena masyarakat bagian selatan yang dulunya menganut sistem liberal dan demokrasi menolak untuk menerapkan sistem tersebut. Dalam bidang agrikultur, para petani menolak untuk memberikan

¹⁸ Edgar O'Balance, *"The War in Vietnam, 1954-1973"*. London: Ian Allan Ltd. 1975. hal 34.

¹⁹ *Ibid*, hal 35.

²⁰ Robert Thompson, *"No Exit From Vietnam"*. London: Chatto and Windus Ltd. 1969. hal 21.

²¹ Bin Nam Tran, *"Economic Liberalization and Vietnam's Long-term Growth Prospect"*. Australian TX Studies Program. University of New South Wales. 1998, hal. 10.

lahannya kepada pemerintah, serta perusahaan-perusahaan swasta yang ada juga menolak untuk memberikan hak kepengurusannya kepada negara. Karena penolakan-penolakan tersebut, akhirnya Vietnam mengalami penurunan produksi pangan. Hal ini pun akhirnya menuntut Pemerintah Vietnam untuk mengambil langkah lain yaitu bergabung COMECON (*Socialist Economic Community*) serta *25 Years of Friendship and Cooperation Treaty* yang merupakan aliansi negara-negara sosialis pada tahun 1978.²²

Sanksi embargo yang diberikan oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat karena pendudukan Vietnam terhadap Kamboja mengakibatkan tidak adanya investasi yang masuk ke Vietnam sehingga stabilitas ekonomi menjadi terganggu dan mengalami keterpurukan. Kondisi ini semakin parah karena Vietnam harus mensubsidi perusahaan-perusahaan negara serta proses rekonstruksi bangunan pasca perang menyebabkan Vietnam harus mengalami hiperinflasi hingga 700% dan pertumbuhan ekonomi negaranya pada saat itu hanya 3% yang mengakibatkan defisit dalam anggaran Vietnam.²³

Kegagalan penerapan sistem ekonomi Sosialis akhirnya membawa Pemerintah Vietnam menempuh jalan lain yaitu pada bulan Desember 1986, partai ke-6 VCP (*Communist Party of Vietnam*) mengumumkan kepada publik bahwa Vietnam membutuhkan strategi baru untuk menjawab permasalahan perekonomian yang sedang mereka hadapi dengan cara melakukan reformasi ekonomi dari sistem ekonomi terpusat menjadi sistem multisektor pasar ekonomi.²⁴

²² Luong Ngoc Thanh, "Vietnam's Foreign Policy in The Post Cold War Era: Ideology and Reality". Hiroshima University. 2013. Hal 55.

²³ Arkadie Mallon. et. al, "Vietnam: A Transition Tiger". Asia Pacific Press. Januari 2004

²⁴ Vo Tri Thanh, "Process of Economic Reforms in Vietnam: What Lesson We Have Learnt From?", Hongkong University of Science and Technology. Hongkong, 2005 Hal 10

Liberalisasi perdagangan Vietnam diwujudkan melalui peran ikut serta secara aktif dalam perdagangan bebas bilateral maupun multilateral. Vietnam telah bergabung dalam perjanjian perdagangan dengan 60 negara dan telah memiliki hubungan perdagangan dengan 170 negara di dunia. Vietnam telah melakukan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa sejak 1992. Selain itu Vietnam juga telah menjadi anggota ASEAN sejak 1995 dan APEC pada 1998. Hingga saat ini Vietnam telah tergabung ke dalam 14 FTA bilateral maupun Multilateral dalam kawasan maupun luar kawasan.

3.2. Kepentingan Vietnam Membangun Kekuatan Militer dan Ekonomi di Wilayah Asia Tenggara

Vietnam secara resmi bergabung dengan ASEAN pada Juli 1995. Hal ini merupakan langkah pertama bagi Vietnam untuk semakin membuka diri dengan negara-negara adidaya lainnya. Bergabungnya Vietnam dengan ASEAN membawa dampak dan perubahan yang signifikan bagi Vietnam. Langkah strategis Vietnam untuk bergabung dengan ASEAN memberikan kontribusi dalam menyatukan solidaritas ASEAN dengan negara-negara Indocina lainnya seperti Kamboja dan Laos. Vietnam memainkan peran strategis dengan mitra-mitra ASEAN yang merupakan negara adidaya seperti Amerika, Rusia, Cina, dan Uni Eropa.

Amerika Serikat dan Vietnam hampir tidak pernah menjalin hubungan bilateral paska kemenangan Vietnam Utara pada tahun 1975.—Tuntutan dari pemerintah Vietnam kepada Amerika Serikat pada tahun 1980 merupakan timbal balik dari informasi yang diberikan Vietnam mengenai tentara-tentara Amerika yang hilang ketika perang.

Vietnam mulai mengatur langkah untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat pada tahun 1980. Kerjasama militer antara Vietnam dan Amerika Serikat diawali pada tahun 1987, ditandai dengan kedatangan Jenderal Jhon

Vessey dengan tugas membahas isu POW dan MIA dengan Vietnam atas perintah Presiden Ronald Reagan.

Fokus kerjasama militer pada tahun 1996 hingga 1999 mencakup konferensi multilateral dan seminar, kunjungan militer dan kerjasama korban bencana, dan keamanan lingkungan. Amerika Serikat lalu mendorong hubungan kerjasama militernya ke arah yang lebih baik pada tahun 2000-2004. Kerjasama tersebut salah satunya dalam bentuk upaya Amerika Serikat untuk memodernisasi militer Vietnam dan upaya untuk melakukan latihan pertahanan bersama.

Amerika Serikat mencabut larangan penjualan senjata terhadap Vietnam pada akhir tahun 2014, meskipun pencabutan larangan penjualan senjata tidak diberlakukan secara menyeluruh, hanya untuk perlengkapan maritim. Juru bicara Pemerintah Vietnam, Nguyen Van Nen, mengatakan bahwa Vietnam dan Amerika Serikat telah menggalang hubungan kemitraan komprehensif. Penghapusan embargo tersebut menjadi aktivitas sebagai bentuk saling percaya dan perkembangan yang lebih komprehensif dalam hubungan antara dua negara. Hal ini juga akan turut menciptakan syarat yang lebih kondusif lagi kepada Vietnam untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional.

3.3. Konflik atas Klaim Kepulauan di Wilayah Perairan Laut Cina Selatan dengan Tiongkok

Kawasan laut Cina Selatan telah menjadi primadona dalam isu keamanan dalam hubungan internasional di ASEAN sejak tahun 90-an. Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh negara-negara besar dan kecil seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Cekungan laut ini merupakan lokasi dari kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Kepulauan Spratly lebih banyak di bicarakan dalam berbagai kajian tentang konflik di laut Cina Selatan karena melibatkan beberapa negara di ASEAN,

sementara kepulauan Paracel hanya melibatkan Vietnam dengan Tiongkok.²⁵

Konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak, ikan, dan transportasi. Minyak menjadi sumber daya yang paling diincar karena hingga saat ini, untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tersebut tidak dapat dilepaskan dari konflik militer bahkan invasi militer, sebagaimana invasi yang dilakukan Amerika ke Iraq tahun 2003.²⁶

Kawasan Laut Tiongkok Selatan juga dikenal kaya dengan ikan yang merupakan sumber gizi penduduk di sekitarnya. Kawasan Laut Tiongkok Selatan diperkirakan mampu menyediakan kebutuhan protein bagi 1 milyar penduduk Asia, atau paling tidak 600 juta penduduk pantai.²⁷ Ikan merupakan sumber makanan dari alam yang selalu diproduksi, maka konflik di kawasan ini pun tidak dapat dilepaskan dari perburuan hasil laut tersebut.

Konflik yang terjadi antara Vietnam dan Tiongkok tersebut dikarenakan tindakan saling klaim atas pulau Paracel yang letak geografisnya berada di perbatasan kedua negara yang memiliki kekayaan alam seperti minyak dan hasil lautnya. Tiongkok terlihat lebih dominan dalam permasalahan ini karena memiliki kekuatan militer yang lebih dibandingkan Vietnam.

Vietnam Memperbaiki Hubungan Diplomatik Dengan Amerika Serikat Pasca Embargo

4.1. Pencabutan Embargo Ekonomi dan Senjata terhadap Vietnam oleh Amerika Serikat

²⁵ Sucipto Achmad. *Laksamana TNI (Purn)*. "Bagaimana Kita Memandang Laut Cina Selatan." JALASANA Edisi III. 2013.

²⁶ Sengketa Laut Cina Selatan. (Diakses dari : Internasional.sindownews.com pada 20 Oktober 2017)

²⁷ <http://leeyonardoisme.com> (Konflik Laut Cina Selatan diakses pada : 20 oktober 2017)

Pada tahun 1994 Amerika Serikat pun akhirnya mencabut sanksi embargo ekonomi terhadap Vietnam, sehingga Vietnam kembali mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi internasional. Normalisasi diplomatik antara Amerika Serikat dengan Vietnam pada tahun 1995 bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang sempat tidak harmonis dikarenakan Amerika Serikat dengan Vietnam pernah terlibat perang dan juga akibat pendudukan Vietnam terhadap Kamboja yang berakibat Vietnam mendapatkan sanksi embargo ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat. Tujuan dari normalisasi hubungan diplomatik tersebut adalah untuk menjalin kerjasama dan saling membantu di berbagai bidang antara kedua negara.

Kerjasama Vietnam dan Amerika Serikat mengalami peningkatan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan juga pertahanan/militer. Amerika Serikat merupakan pasar besar untuk menjual barang-barang yang diekspor oleh Vietnam, sehingga akan meningkatkan pendapatan negara serta mampu memperbaiki perekonomian di Vietnam. Vietnam merupakan pasar yang sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk memasarkan produknya.

Undang-undang yang membangun hubungan perdagangan yang permanen memperluas perdagangan Amerika Serikat dan Vietnam dalam membantu peningkatan standar kehidupan Vietnam. Hubungan perdagangan yang penuh dengan Vietnam menjadi suatu pasar besar yang menandai langkah lainnya ke arah rekonsiliasi dengan Amerika Serikat yang kalah pada perang 1957-1975, dan komunis yang berhasil menang pada perang Vietnam tersebut.²⁸

Penandatanganan RUU Normalisasi Perdagangan mengantarkan kesempatan di era baru dalam kerjasama ekonomi antara Vietnam dan Amerika Serikat. Hubungan

²⁸<http://www.merdeka.com> (Bush Tandatangani Ruu Normalisasi perdagangan dengan Vietnam) (diakses pada: 15 Juni 2018)

perdagangan yang normal dan permanen diperlukan Amerika Serikat untuk memberikan kemungkinan tarif yang rendah kepada suatu negara dan agar saling memperoleh keuntungan dari sesama negara anggota WTO.

Hal yang paling signifikan setelah normalisasi adalah bahwa Amerika Serikat dan Vietnam menegaskan kepentingan dan prinsip-prinsip umum dalam hubungan bilateral “kerjasama yang ramah atas dasar kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan”. Pencapaian dari perdagangan dan kerjasama ekonomi sangat bermanfaat bagi kedua negara.

Nilai perdagangan bilateral Amerika Serikat dan Vietnam meningkat lebih dari 80 kali lipat dalam 15 tahun terakhir, mencapai 16 milyar USD pada tahun 2009, mengubah Amerika Serikat menjadi pasar terbesar untuk barang Vietnam.²⁹ Bahkan pada tahun 2009, perekonomian Amerika Serikat yang sedang menghadapi kesulitan, Amerika Serikat mampu menjadi investor asing terbesar di Vietnam dengan jumlah total investasi 9,8 milyar USD.³⁰

Vietnam dan Amerika Serikat telah mengalami kemajuan pesat dalam hubungan ekonomi dan sosial. Hal itu ditunjukkan dengan sikap keterbukaan kedua negara dalam menjalankan hubungan ekonomi dan sosial sehingga mampu menghasilkan perjanjian-perjanjian serta kerjasama nyata di berbagai bidang terkait. Hubungan pertahanan kedua negara belum mengalami kemajuan, tidak ada kerjasama nyata di level military-to-military, tidak ada perjanjian pertahanan resmi, dan kedua negara masih bersikap tertutup atau

²⁹

<http://antaranews.com/berita/333773/perdagangan-AS--vietnam-terus-tumbuh-positif>. (Perdagangan AS-Vietnam terus tumbuh positif) diakses pada) 21 Juni 2018

³⁰ <http://vietnamconsulateinhouston.org/> (fifteen Year After Normalization, Vietnam-US. Relations Looking Forwards To A Brighter Future) (diakses pada : 16 Juni 2018).

menahan diri dalam menyikapi hubungan pertahanan.³¹

Amerika Serikat dan Vietnam mengumumkan minat untuk kerjasama lebih kuat dalam bidang pertahanan pada September 2011. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta, melakukan kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Vietnam Hung Quang Thanh. Panetta juga mengunjungi pelabuhan Cam Ranh Bay, bekas markas besar militer Amerika Serikat pada saat perang Vietnam.³²

Duta Besar Vietnam di Amerika Serikat, Nguyen Quoc Cuong menilai selama hampir 2 dekade sejak melakukan normalisasi hubungan, dua belah pihak telah berhasil menciptakan pondasi yang cukup bagus dengan mekanisme-mekanisme kerjasama yang stabil bagi hubungan bilateral. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan setiap tahunnya. Dua negara ini sekarang sedang mejalin hubungan yang lebih erat dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Penghapusan embargo tersebut akan menjadi aktivitas yang memmanifestasikan saling percaya menurut semangat berkiblat ke perkembangan yang lebih komprehensif dalam hubungan antara dua negara. Hal ini juga akan turut menciptakan syarat yang lebih kondusif lagi kepada Vietnam untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional.³³

MAAG (Military Assistance Advisory Group) atau kelompok penasihat pembantu militer mengirim sebagian anggotanya ke Vietnam untuk memberikan

pelatihan khusus tentang militer bagi tentara-tentara Vietnam pada 19 Februari 2015.³⁴ MAAG merupakan bentukan dari Amerika Serikat untuk membantu negara-negara yang berkerjasama dengannya di bidang militer.

4.2. Kesepakatan kerjasama Antara Vietnam dan Amerika Serikat melalui kerjasama BTA (*Bilateral Trade Agreement*)

Bilateral Trade Agreement (BTA) merupakan persetujuan kerjasama perdagangan yang dibuat antara dua negara. Vietnam dan Amerika Serikat menandatangani BTA pada 13 Juli 2000 dan kemudian dikukuhkan pada 10 Desember 2001. Hal tersebut ditandai dengan pertukaran surat perjajian secara resmi antar kedua belah pihak. Report For Congress The Vietnam – US Bilateral Trade Agreement pada 9 September 2002 menjelaskan secara garis besar hubungan kedua negara tersebut dalam BTA, salah satunya mengidentifikasi motif Vietnam dan Amerika Serikat melakukan perjanjian tersebut.

Vietnam menandatangani Bilateral Trade Agreement (BTA) dengan Amerika Serikat pada 2001. Agreement Between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relation pada tahun 2002, menunjukkan kedua Negara menyepakati bahwa aspek ekonomi dan hubungan dagang serta hak perlindungan kepemilikan intelektual merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan dalam memperkuat hubungan bilateral keduanya.

Intensitas kunjungan kedua Negara terus meningkat dalam kurun waktu 2001-2006. BTA menunjukkan pengaruh langsung karena adanya inisiasi bebas tarif dari pihak Amerika Serikat atas ekspor Vietnam. Volume ekspor terus bertambah antara 16-29% di tahun 2004, 2005, dan

³¹ Sheldon Simon, "U.S.-Southeast Asia Relations: Growing Enmeshment in Regional Affairs", Center for Strategic and International Security (2010): 12. (http://csis.org/files/publication/1003qus_seasia.pdf) (diakses : 18 september 2017).

³² www.dw.com/id/paneta-upayakan-kerjasama-lebih-erat-dengan-vietnam/a-15997595 (diakses pada : 18 agustus 2017)

³³

<http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/118611731/AS-Cabut-Embargo-Penjualan-Senjata-ke-Vietnam> (Diakses pada : 24 september 2018)

³⁴ <http://thefreencyclopedia.html> (diakses pada : 25 september 2018)

2006, setelah terjadi kemajuan yang sama pada 2001-2003.

Ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat lebih dari 18 kali lipat. Kerjasama perdagangan antara kedua negara tersebut melibatkan aktivitas ekspor-impor timbal balik antara kedua negara. Komoditas ekspor utama Vietnam yaitu pakaian, produk petroleum, alas kaki, furniture, udang beku, kopi, mesin elektrik. Ekspor utama Amerika Serikat antara lain kursi penumpang, peralatan dan perlengkapan kantor, plastic, mesin elektrik, kendaraan bermotor, dan susu olahan.

Vietnam mengalami perubahan yang signifikan setelah pulih dari perang, dan BTA merupakan lompatan bagi Vietnam menuju WTO. BTA juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan status hubungan dagang yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam. Hal ini membuka akses jalan Vietnam masuk dalam lingkaran perdagangan dan investasi global.

4.3. Vietnam bergabung dengan WTO (World Trade Organization)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengawasi aturan perdagangan antara para negara anggotanya. Upaya pengajuan proposal Vietnam untuk dapat bergabung memakan waktu lebih kurang 12 tahun akhirnya disetujui Majelis Umum WTO pada November 2006 yang kemudian diresmikan pada 11 Januari 2007. Keanggotaan tersebut menandakan bahwa Vietnam telah terintegrasi sebagai anggota masyarakat dunia, dimana Vietnam harus siap menerima penerapan setiap instrument kebijakan yang ditetapkan oleh WTO.

Peningkatan perekonomian Vietnam menjadikan negara Vietnam sebagai anggota WTO (World Trade Organization) pada 11 Januari 2007 atas dasar ajakan dari Amerika Serikat. Normalisasi perdagangan Amerika Serikat dan Vietnam, dimulai saat penandatanganan

RUU normalisasi kerjasama dibidang perdagangan dengan Vietnam pada bulan Desember 2006 presiden Amerika Serikat George W. Bush, dan langsung disahkan oleh Kongres Amerika Serikat beberapa hari setelah itu. Langkah itu menjadi awal masuknya Vietnam pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Januari 2007. Vietnam menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Perjanjian bilateral ini telah membawa Vietnam pada kondisi masyarakat demokrasi melalui kelola pemerintahan yang menjadikan pasar sebagai pusat perbaikan dan kemajuan ekonomi, mensolidkan sistem hukum, mengintegrasikan usaha Vietnam dalam ekonomi global. BTA sangat berkaitan erat dengan lingkungan bisnis, terutama ekspor dan investasi asing (Foreign Direct Investment) atau FDI. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh bagi hasil dan kemajuan ekonomi yang dialami Vietnam.

Hanya dalam tempo lima tahun dari 2001-2006, ekonomi Vietnam mengalami perluasan hampir mencapai 50%. Sejak adanya BTA, Vietnam menjadi pasar yang mengalami pertumbuhan yang cepat bagi ekspor dan FDI Amerika Serikat.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepentingan Vietnam Memperbaiki Hubungan Diplomatik dengan Amerika Serikat Pasca Embargo adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian Vietnam dan juga untuk meningkatkan kekuatan militernya terutama di kawasan Asia Tenggara.

³⁵ Assessment of the Five-Year Impact of the U.S.-Vietnam Bilateral Trade Agreement on Vietnam's Trade, Investment, and Economic Structure by Vietnam's Ministry of Planning and Investment's Central Institute of Economic Management and foreign Investment Agency and the U.S. Agency for International Development-Funded Support for Trade Acceleration (STAR) Projek, July 2007.

Pada tahun 1964 yang dimana pada masa itu sedang terjadi perang Vietnam. Perang tersebut melibatkan Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Pada tahun tersebut, Amerika Serikat memberikan sanksi embargo ekonomi terhadap Vietnam Utara. Kemudian pada tanggal 30 April 1975, pemerintahan Saigon runtuh sehingga wilayah Vietnam Selatan berhasil dikuasai Vietnam Utara dan mendeklarasikan bahwa Vietnam telah bersatu dan merdeka di bawah panji sosialis-komunis. Kemudian pada tahun 1979, Vietnam melakukan invasi ke Kamboja dan mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan sekutunya sehingga Vietnam diembargo ekonomi, senjata dan isolasi.

Karena sanksi tersebut perekonomian Vietnam mengalami kegagalan dan tidak mempunyai sistem sosialis untuk menjawab permasalahan tersebut sehingga pada tahun 1986, pemerintah Vietnam menempuh jalur lain yaitu dengan paket kebijakan *Doi Moi* Vietnam mulai melakukan reformasi dibidang perekonomiannya dengan cara membuka dan memberikan kebebasan bagi pelaku ekonomi untuk mengatur sistem pasar. Serta Vietnam tetap mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Hingga pada tahun 1994, Sanksi embargo terhadap Vietnam dicabut dan kerjasama antara Vietnam dengan Amerika Serikat pun meningkat.

Dapat dikatakan bahwa, Vietnam melakukan perbaikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat adalah untuk meningkatkan kestabilan perekonomian dan perpolitikan negaranya, serta dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat, Vietnam juga bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam persiapan menjaga intergritas negaranya khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dan juga Vietnam membutuhkan dukungan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan.

Referensi

Jurnal dan Artikel

- Assessment of the Five-Year Impact of the U.S.-Vietnam Bilateral Trade Agreement on Vietnam's Trade, Investment, and Economic Structure by Vietnam's Ministry of Planning and Investment's Central Institute of Economic Management and foreign Investment Agency and the U.S. Agency for International Development-Funded Support for Trade Acceleration (STAR) Proyek, July 2007.
- Bin Nam Tran, "*Economic Liberalization and Vietnam's Long-term Growth Prospect*". Australian TX Studies Program. University of New South Wales.1998.
- Jordan, Wiliam, Lewis M. Stern, Walter Lohman. *U.S.-Vietnam Defense Relations : Investing in Strategic Alignment*. The Heritage Fondation Leadership for America, No.2707. 2012.
- Kaza & M. Saeri. *Dukungan Arab Saudi Terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013*.Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 2, Februari 2014.
- Kiyoko Kusuru Nitz, "*Japanese Military Policy Towards French Indochina during the Second World:The Road to the Meigo Sakusen*".Journal of Southeast Asian Studies.1983.
- Le Hong Hiep, "*The TPP's Impact on Vietnam: A Preliminary Assessment*", Yusof Ishak Institute. Singapore, November 2015.
- Luong Ngoc Thanh. "*Vietnam's Foreign Policy in The Post Cold War Era:Ideology and Reality*".Hiroshima University.2013.
- Marzuki. M.M. *Metodologi Riset*. BPFE UII. Yogyakarta.2002.
- Nguyen Thu Tuy et al., "*Exploring Vietnam's progress in economic growth*", Swiss Programme for

- Research on Global Issues for Development. 2015.
- Storey, I. *Trouble and Strife in South China Sea: Vietnam and china*. China Brief. 2008.
- Sucipto Achmad. Laksamana TNi (Purn). *"Bagaimana Kita Memandang Laut China Selatan"*. Jalasena Edisi III. 2013.
- The National Institute for Defense Studies, 2010.
- Victor A. De Fiori. *"Is United States Participation in South Vietnam and Cambodia"*. 7 Desember 1970. National Security Council. United States of America.
- Vo Tri Thanh, *"Process of Economic Reforms in Vietnam: What Lesson We Have Learnt From?"*, Hongkong University of Science and Technology. Hongkong, 2005.
- Vu Khoan, *"Integrating into the World and preserving Our national Identity"*, Security, Development and Influence in International Reactions, Vietnam Foreign Ministry, Hanoi, 1995.
- Buku**
- Abu Thalib Ahmad, *"Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara"*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991.
- Allan Watt, *"Vietnam: An Australian Analysis"*. Melbourne: F.W Cheshire Publishing. 1968.
- Arkadie Mallon. et. el, *"Vietnam: A Transition Tiger"*. Asia Pacific Press. Januari 2004.
- Budi Winarno. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. CAPS (Center of Academic Publishing Service) : Yogyakarta. 2014.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara .Teropong Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Couloumbus, Theodore A. dan James H. Wolfe. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*. Jakarta: Penerbit Putra A. Bardin. 1999.
- D.R Sardesai, *"Vietnam: The Struggle for National Identity"*. Edisi Kedua. Boulder: Westview Press Inc., 1992.
- Edgar O'Balance, *"The War in Vietnam, 1954-1973"*. London: Ian Allan Ltd. 1975.
- George Mc Turnan Kahin (ed), *"Kerajaan dan Politik Asia Tenggara"*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1982.
- Hock, David Koh Wee, *"Legacies of World War II in South and East Asia"*. Institute of Southeast Asian Studies. 2007.
- Hugh Higgins, *"Vietnam"*. London: Heinemann Educational Books Ltd. 1975.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin 1999.
- Jean Chesnaux, *"The Vietnamese Nation: Contribution to a History"*. terjemahan Malcom Salmon. Sydney: Current Books Distribution Pty. Ltd. 1966.
- John Richard Hicks, *"Vietnamese –Soviet Relations, China and South East Asia"*. Hull: University of Hull. 1962.
- Kegley, Charles W. Jr., and Eugene R. Wittkopf. *World Politics: Trend and Transformation*. New York: St. Martin's Press. 1995.
- Kevin Ruane, *"War and Revolution in Vietnam 1930-1975"*. London: UCL Press. 1998.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja Rosda Karya. 2004.
- Mark R. Amstutz dalam Aleksius Jemadu. *Politik Global dalam teori & Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3E.. 1990.

P. J. Honey (ed), "*North Vietnam Today : Profile of Communist Satellite*". New York: Frederick A. Praeger Inc. 1962.

Peter A. Poole, "*Dien Bhien Pu 1945: The Battle That Ended the First Indochina War*". New York: Franklin Watts Inc. 1972.

Philippe Devillers, "*Sejarah Indo-China Modern: Perkembangan Sosiopolitik hingga Abad ke-20*". Terjemahan Ruhanas Harun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1998.

Robert Thompson, "*No Exit From Vietnam*". London: Chatto and Windus Ltd. 1969.

Internet dan Media Online

- AS Cabut Embargo Penjualan Senjata ke Vietnam*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/118611731/AS-Cabut-Embargo-Penjualan-Senjata-ke-Vietnam> diakses pada 24 Agustus pukul 19.00 WIB.
- AS Cabut Embargo Senjata Kepada Vietnam*, dalam <http://cnnindonesia.com/internasional/20140925083842-113-4309/as-cabut-embargo-senjata-kepada-vietnam> diakses pada 24 Agustus 2018 pukul 19.05 WIB.
- Duta Besar AS di Vietnam Meminta Penghapusan Embargo Senjata*, dalam <http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Duta-besar-AS-di-Vietnam-meminta-penghapusan-embargo-senjata/275392.vov> diakses pada 22 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.
- Fifteen Year After Normalization, Vietnam-US. Relations Looking Forwards To A Brighter Future*, dalam <http://www.vietnamconsulateinhouston.org/> diakses pada 20 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.
- Konflik Laut China Selatan*, dalam <http://leeyonardoisme.com> pada 20 Juni 2018 pukul 19.40 WIB.
- Perdagangan AS-Vietnam terus tumbuh positif*, dalam <http://www.antaranews.com/berita/333773/perdagangan-AS--vietnam-terus-tumbuh-positif.htm> diakses pada 20 Agustus 2018 pukul 19.55 WIB.
- Perkembangan Ekonomi AS- Vietnam Pasca Normalisasi*, dalam <http://www.oecd.org/bookshp> diakses pada 20 Juni 2018 pukul 19.45 WIB.
- Remember Vietnam*, dalam <http://www.nnn.se/vietnam/history.pdf> diakses pada 19 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB.
- Sengketa Laut China Selatan*, dalam <http://www.sindonews.com> pada 20 Juni 2018 pukul 19.35 WIB.
- Sheldon Simon, "*U.S.-Southeast Asia Relations: Growing Enmeshment in Regional Affairs*", *Center for Strategic and International Security*". Dalam http://www.csis.org/files/publication/1003qus_seasia.pdf diakses pada 18 Juni 2018 pukul 19.00 WIB.
- Vietnam GDP*, dalam <http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp>, diakses pada 27 Agustus 2018 WIB.
- Yale Journal. dalam <http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2010/09//105202walt.pdf> diakses pada Juni 2018 pukul 19.20 WIB